



## *The Effectiveness of the HIV Prevention and Control Program by the Bekasi City Health Office*

### **Efektivitas Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi**

Haikal Zindan<sup>1</sup>, Maulana Rifai<sup>2</sup>, Rachmat Ramdani<sup>3</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Corresponding Author: [1910631180078@student.unsika.ac.id](mailto:1910631180078@student.unsika.ac.id)

#### Article Info

#### Abstract

Received:  
24/08/2024  
Revised:  
14/03/2025  
Accepted  
18/05/2025

**Abstract:** This study aims to evaluate the effectiveness of the HIV prevention and control program implemented by the Bekasi City Health Office. The analysis refers to Sutrisno's (2007) indicators of program effectiveness, which include program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible outcomes. A qualitative research approach was employed, using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the HIV prevention and control program has generally been effective in its implementation. However, the goal achievement indicator has not been fully realized, as the Bekasi City Health Office has yet to meet the targets stipulated in the Ministry of Health Regulation No. 23 of 2022, Article 4(2). This research provides valuable insights and serves as an evaluation tool for improving the effectiveness of future HIV prevention and control efforts. The novelty of this study lies in its analysis of HIV-related issues in Bekasi City from the perspective of Government Science.

#### Keywords:

Program Effectiveness;  
HIV Prevention; HIV  
Control; Health Office;  
Bekasi City

#### Kata Kunci:

Efektivitas Program;  
Pencegahan HIV;  
Penanggulangan HIV;  
Dinas Kesehatan; Kota  
Bekasi

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pencegahan dan penanggulangan HIV yang ditinjau menggunakan indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007) yang terdiri dari pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pencegahan dan penanggulangan HIV yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah berjalan secara efektif. Sayangnya, pada indikator tercapainya tujuan belum efektif. Dinas Kesehatan Kota Bekasi belum mampu mencapai target yang ditetapkan pada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (2). Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bekasi. Kebaharuan dari penelitian ini adalah mengkaji isu HIV yang ada di Kota Bekasi dari sisi Ilmu Pemerintahan.

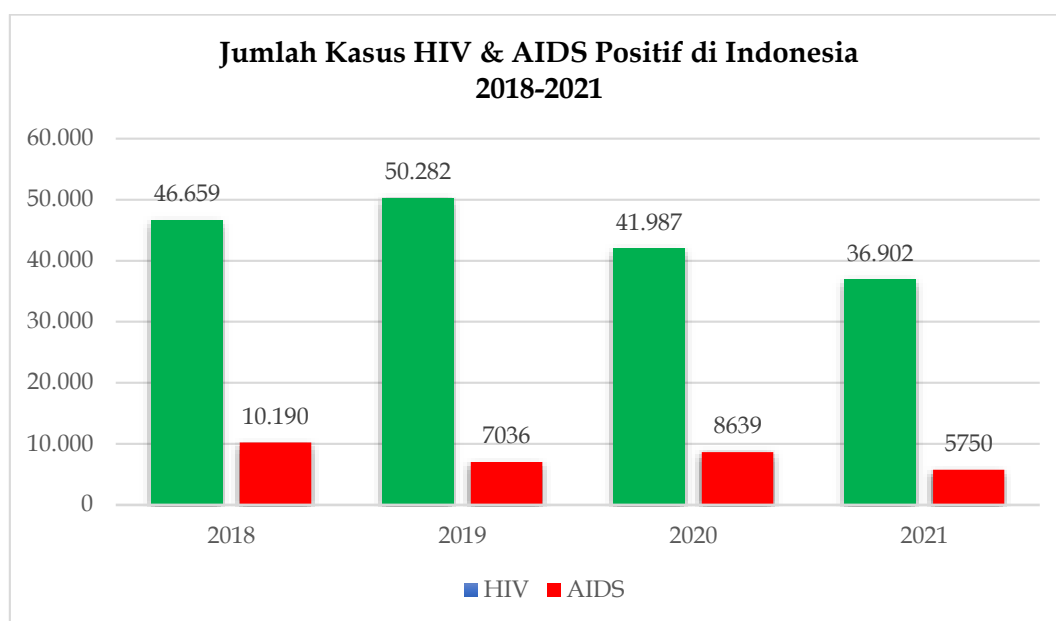
#### PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak masyarakat atas kesehatan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana cita-cita dan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam penyediaan fasilitas



pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya kualitas kesehatan masyarakat sejalan dengan kemajuan sebuah negara, karena masyarakat yang sehat menjadi faktor pendukung pembangunan dan perkembangan sebuah negara.

Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Permasalahan kesehatan seperti tingkat penderita penyakit menular maupun penyakit tidak menular (PTM) yang fluktuatif setiap tahunnya menjadi tantangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan dinamika kesehatan masyarakat. Maka dari itu, tidak hanya harus melakukan tindakan represif berupa penanggulangan saja, pemerintah juga harus mampu menciptakan kebijakan dan program yang dapat mencegah naiknya angka perkembangan penyakit di masyarakat.

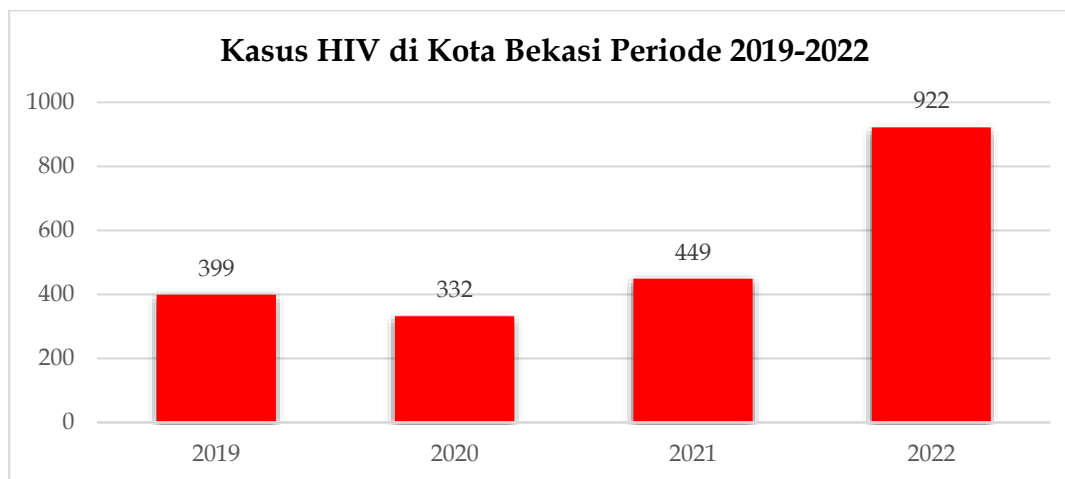


Gambar 1.1 Data Perkembangan Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Indonesia Periode 2018-2021

Jika melihat data statistik, penderita HIV di Indonesia tergolong dalam kategori yang cukup mengkhawatirkan. Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga Juni 2022 total 519.158 orang yang divonis menenderita HIV. Jumlah tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hingga tahun 2023, HIV masih menjadi masalah yang patut diwaspadai pemerintah. Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keadaan penyakit tersebut di masyarakat, karena pada dasarnya kebijakan yang diciptakan merupakan upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan membentuk sebuah kebijakan menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Laporan Perkembangan HIV, AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan tingkat HIV yang tinggi disusul Jawa Timur DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Selama periode Triwulan I (Januari-Maret) hingga Triwulan IV (Oktober-Desember) pada tahun 2021, Jawa Barat menduduki peringkat dua teratas sebagai provinsi dengan penambahan ODHA HIV. Dalam Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021, kasus HIV tertinggi pada tahun 2020 diduduki secara berurutan oleh Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi.

Kemudian pada tahun 2021, kasus HIV tertinggi diduduki secara berurutan oleh Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, dan Kota Cirebon. Daerah dengan kasus HIV tinggi diduduki oleh kabupaten dan kota yang sama selama periode 2020-2021. Fenomena lonjakan kasus HIV di Kota Bekasi pada tahun 2022 menjadi salah satu alasan Peneliti memilih Kota Bekasi sebagai lokus penelitian.



Gambar 1.2 Data Perkembangan Kasus HIV di Kota Bekasi pada Periode 2019-2022

Penelitian ini akan berfokus tentang bagaimana efektivitas dari program pencegahan dan penanggulangan penyebaran HIV di Kota Bekasi. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas penyebab dari kenaikan angka penderita HIV dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Untuk mengukur efektivitas program pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bekasi, penelitian ini menggunakan Indikator Efektivitas Program yang dikemukakan oleh Sutrisno. Sutrisno (2007) menyatakan bahwa indikator untuk menilai efektivitas suatu program yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan serta perubahan nyata.

## TINJAUAN PUSTAKA (*LITERATURE REVIEW*)

### Konsep Efektivitas

Secara umum, efektivitas dipahami sebagai upaya yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan aspek efisiensi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai suatu usaha yang dapat membawa hasil. Kata efektif sendiri diambil dari bahasa Inggris *effective* yang menurut *Oxford English Dictionary* adalah menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan atau tujuan. Makna tersebut selaras dengan definisi efektivitas yang dikemukakan oleh Subagyo. Menurut Subagyo (2000), efektivitas adalah sesuainya output atau hasil dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Mahmudi (2005), efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sondang P. Siagian (2001) memaknai efektivitas sebagai (proses) pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar telah ditetapkan untuk menghasilkan barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Siagian menilai efektivitas dari tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Semakin mendekati tujuan, maka semakin efektif. Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan proses pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya dan waktu yang telah ditentukan secara efisien.

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat ketercapaian tujuan dalam sebuah organisasi. Semakin efektif sebuah organisasi, maka peluang untuk mencapai tujuan menjadi lebih besar.

Bila dilihat secara garis besar, tercapainya tujuan merupakan bukti efektivitas dari kinerja organisasi atau program. Namun, pengukuran efektivitas tidak hanya terpaku pada keberhasilan dalam mencapai tujuan saja. Terdapat beberapa aspek atau indikator juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif sebuah organisasi atau program berjalan namun untuk penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno. Sutrisno (2007) menyatakan indikator-indikator efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Program.

Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksud ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini juga dimaksudkan ketika program yang dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya pihak yang perlu memahami ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.

2. Tepat Sasaran.

Sasaran yang dibahas dalam indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau secara langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu program dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal.

3. Tepat Waktu.

Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

4. Tercapainya Tujuan.

Pada indikator ini mengukur keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai.

5. Perubahan Nyata.

Dalam poin terakhir yaitu mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditentukan sejak awal pada program ini dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan rencana.

### **Konsep Program**

Program diambil dari kata berbahasa Inggris *programme* yang secara kasar diterjemahkan sebagai rencana. Sedangkan menurut KBBI, program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Program merupakan instrumen dalam sebuah rencana. Oleh karena itu, definisi umum dari program adalah penjabaran dari suatu rencana. Program juga kerap diartikan sebagai kerangka dasar pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan program sebagai berikut: Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa program pemerintah merupakan yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Menurut Jones (1996), program merupakan cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Pengertian tersebut memposisikan program sebagai bagian dari langkah-langkah untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Munthe (2015), program diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang terencana dengan sistematis untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata secara berkelanjutan dalam organisasi serta melibatkan banyak orang di dalamnya. Program dalam suatu organisasi disusun dan disepakati bersama oleh setiap anggota dengan mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki organisasi. Dengan adanya program, kegiatan organisasi menjadi lebih terarah, sehingga program juga dapat dimaknai sebagai pedoman organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa program merupakan bagian dari rencana yang disusun berdasarkan sumber daya, prosedur, dan kebijakan untuk mengatur kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi.

## HIV dan AIDS

*Human Immunodeficiency Virus* atau yang dikenal dengan HIV merupakan virus yang menyerang sistem imunitas tubuh manusia. HIV menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 dan merubahnya menjadi tempat berkembang biak virus HIV baru kemudian merusaknya sehingga tidak dapat digunakan lagi (Redline Indonesia, 2021). Sel darah putih penting untuk sistem kekebalan tubuh, jika sistem kekebalan ini terus melemah, maka tubuh akan rentan diserang oleh penyakit-penyakit yang dalam keadaan normal tidak dapat bertahan di dalam tubuh manusia. Kemudian, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV yang berhasil merusak imunitas tubuh manusia.

AIDS juga diketahui sebagai tahap akhir dari infeksi HIV. Oleh karenanya manusia dapat meninggal bukan semata-mata oleh virus HIV-nya melainkan oleh penyakit lain yang sebenarnya bisa ditolak seandainya daya tahan tubuhnya tidak rusak. HIV dapat menular melalui tiga metode, yaitu secara vertikal, horizontal, dan transeksual. Penularan secara vertikal terjadi ketika ibu pengidap HIV/AIDS menyusui ke bayi. Penularan secara horizontal yakni melalui kontak dengan darah positif HIV seperti menerima transfusi darah yang terinfeksi HIV, pemakaian alat-alat kesehatan yang tidak steril, penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian, dan tato dengan menggunakan benda tajam yang tidak steril. Sedangkan penularan secara transeksual terjadi saat kontak dengan cairan kelamin ODHA (Nasorudin, 2007)

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual kelompok yang beresiko tinggi menularkan HIV/AIDS diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Klasifikasi Kelompok yang Beresiko Menularkan HIV/AIDS**

Populasi Kunci	Populasi Khusus	Populasi Rentan
1. Pekerja seks, 2. Pengguna Napza suntik (penasun), 3. Waria, dan 4. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL)	1. Pasien Tuberkulosis, 2. Pasien IMS, 3. Ibu hamil, 4. Tahanan dan warga binaan masyarakat	1. Anak jalanan, 2. Remaja, 3. Pelanggan pekerja seks, 4. Pekerja migran, dan 5. Pasangan populasi kunci/ODHIV/pasien IMS.

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022

Sebagaimana kebanyakan virus yang ada di dunia, virus HIV dapat dicegah penularannya. Di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang

Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual memberikan arahan bagaimana pencegahan penularan HIV. Dalam Pasal 9, nomor (3) mengatakan bahwa pencegahan penularan HIV dan IMS dilakukan dengan cara sebagai berikut; 1) Menerapkan perilaku aman dan tidak beresiko; 2) Konseling; 3) Edukasi; 4) Penatalaksanaan IMS; 5) Sirkumsisi; 6) Pemberian kekebalan; 7) Pengurangan dampak buruk NAPZA; 8) Pencegahan penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak; 9) Pemberian ARV profilaksis; 10) 12) Uji saring darah donor, produk darah, dan organ tubuh; dan 13) Penerapan kewaspadaan standar.

Sayangnya, karena belum adanya obat yang dapat menghilangkan virus HIV dalam tubuh penderita secara total, maka tindakan penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan menekan jumlah virus (*viral load*) di dalam tubuh penderita. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022, Antiretroviral adalah obat yang diberikan untuk pengobatan infeksi HIV untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi.

### **METODOLOGI (METHODOLOGY)**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Selain menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menyajikan hasil analisis yang bersifat deskriptif. Menurut Muhadjir (1996), metode deskriptif menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis, lisan atau perilaku yang diamati dimana penelitian ini menekankan proses dibandingkan hasil dari objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul direduksi, disajikan, hingga ditemukan kesimpulan dari penelitian (Miles dan Huberman, 1992). Tujuan dari perumusan kesimpulan adalah untuk memperjelas fenomena atau masalah penelitian yang dirasa belum jelas. Dari uraian tersebut maka penelitian ini akan menjelaskan tentang fenomena peningkatan kasus HIV pada tahun 2022 yang terjadi di Kota Bekasi dengan menganalisis efektivitas program pencegahan dan penanggulangan HIV yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)**

Peneliti mengumpulkan data dari para informan secara bertahap mulai dari informan utama, informan kunci hingga ke informan tambahan. Informan utama dalam penelitian ini adalah dr. Siti Nurliah, M.KM yang menjabat sebagai Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Selanjutnya informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus LSM yang berkecimpung dalam permasalahan HIV di Kota Bekasi. Peneliti berhasil mewawancarai dua orang pengurus LSM dari dua LSM berbeda yakni Bang Hanca dari Lembaga Kasih Indonesia dan Pak Daniel dari Yayasan Grapiks. Terakhir, sebagai informan tambahan adalah anggota kelompok berisiko HIV berjumlah tiga orang (LSL, WTS, dan Transgender/Waria) dan Orang Dengan HIV (ODHIV) berjumlah dua orang. Untuk informan tambahan, peneliti menggunakan nama samaran karena para informan tidak bersedia menggunakan identitas asli.

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, tahap selanjutnya adalah proses analisis data. Dari seluruh data yang diperoleh, peneliti juga dapat menemukan fakta-fakta

baru yang ada dilapangan. Fakta-fakta tersebut akan membantu peneliti untuk memperjelas keadaan sesungguhnya dari suatu fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan komponen analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) yang membagi proses analisis data menjadi tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah hasil analisis peneliti berdasarkan lima indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007):

### **Pemahaman Program**

Pemahaman program erat kaitannya dengan proses sosialisasi. Proses sosialisasi program yang efektif dan efisien akan berdampak pada pengetahuan tentang program. Oleh karena itu, pemahaman atau pengetahuan tentang program menjadi hal yang vital dalam upaya mewujudkan tujuan program. Untuk mengukur seberapa efektif pemahaman program Pencegahan dan Penanggulangan HIV yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, peneliti membagi informan ke dalam tiga berdasarkan sosialisasinya, yakni sosialisasi kepada masyarakat awam, sosialisasi kepada populasi berisiko HIV dan sosialisasi kepada tenaga kesehatan.

Sosialisasi kepada masyarakat awam telah berjalan efektif dengan banyaknya kegiatan seperti seminar bertemakan HIV, sosialisasi dalam kegiatan *Car Free Day* (CFD), dan pengerahan Tenaga Promosi Kesehatan di Layanan Kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga telah berupaya menjangkau masyarakat awam lewat media sosial seperti *Instagram*. Setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Kota Bekasi memiliki akun *Instagram* yang dikelola oleh Tenaga Promosi Kesehatan untuk mempromosikan pelayanan apa saja yang tersedia pada sebuah Puskesmas.

Kemudian, sosialisasi kepada populasi berisiko umumnya dilaksanakan dititik berkumpulnya populasi, Sebagai contoh, Dinas Kesehatan Kota Bekasi sering melaksanakan penjangkauan kepada Wanita Tuna Susila dengan mendatangi panti-panti pijat, apartemen, dan karaoke. Untuk sosialisasi kepada tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyusun kegiatan berupa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan memperbaiki perilaku. Salah satu hal yang menjadi hambatan dari pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bekasi adalah stigma dan diskriminasi yang diterima oleh ODHIV maupun masyarakat populasi berisiko. Maka dari itu, Dinas Kesehatan Kota Bekasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tidak memandang identitas, gender, orientasi seksual, dan lain-lain. Tujuannya agar peserta program merasa nyaman mengikuti program dan secara sukarela tanpa adanya rasa takut akan pandangan-pandangan negatif.

### **Tepat Sasaran**

Dalam indikator ketepatan sasaran, setiap program harus memiliki objek sasaran yang jelas. Dalam konteks program pencegahan dan penanggulangan HIV, sasaran program telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatakan bahwa terdapat tiga populasi yang menjadi sasaran program sebagaimana telah dijelaskan pada Tabel 1.1.

Hasilnya adalah semua informan dari populasi kunci telah mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Namun, pengetahuan mereka terbatas hanya pada kegiatan seperti mobile VCT, sosialisasi di CFD, terapi ARV, dan pembagian PreP. Kemudian, peneliti bertanya kepada para informan tentang informasi HIV secara umum. Hasilnya para informan telah menyadari bahwa mereka termasuk kedalam populasi berisiko HIV dan mengetahui tentang perilaku berisiko HIV serta bentuk pencegahannya. Selain populasi kunci, program pencegahan dan penanggulangan HIV yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga menyasar ibu-ibu hamil yang ada di Kota Bekasi.

Triple Eliminasi bersifat wajib diikuti oleh ibu hamil yang datang berobat ke Puskesmas maupun layanan kesehatan lain. Apabila ada ibu hamil yang berobat kepada bidan praktik mandiri, maka bidan tersebut juga memiliki kewajiban melakukan tes HIV kepada ibu hamil. Jika memang ibu hamil tersebut ditemukan positif HIV, maka akan dialihkan ke Puskesmas untuk mengikuti program penanggulangan HIV yakni terapi ARV. Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi penularan HIV kepada anak yang nantinya akan lahir. Maka telah jelas bahwa menjadikan ibu hamil sebagai sasaran program pencegahan dan penanggulangan HIV adalah langkah tepat.

### **Tepat Waktu**

Waktu didalam sebuah program adalah tenggat yang telah ditentukan pada masa penyusunan program. Untuk mencegah terjadinya kemoloran, waktu menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalankan kegiatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022, waktu yang ditentukan dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV nasional adalah hingga tahun 2030. Sejalan dengan target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menetapkan capaian bulanan, tiga bulanan, dan tahunan. Capaian waktu secara berkala tersebut ditetapkan guna mempermudah proses analisis perkembangan HIV di Kota Bekasi.

Hasil analisis akan menjadi bahan evaluasi dari setiap kegiatan di dalam program. Keterangan yang didapatkan dari program di Puskesmas Rawa Tembaga menunjukkan bahwa kegiatan di Layanan Kesehatan selalu dilaporkan secara tepat waktu meskipun hasilnya belum memenuhi capaian. Artinya, Puskesmas Rawa Tembaga menjunjung prinsip ketepatan waktu dan transparansi. Pada dasarnya, jika bicara soal ketepatan waktu dalam program pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa program berjalan tepat pada waktunya.

Meskipun mungkin ada sedikit keterlambatan karena berbagai halangan, namun program wajib diselesaikan. Ketepatan waktu merupakan sebuah keharusan, karena pemerintah seperti Pemerintah Daerah di Tingkat Kota atau Kabupaten, bertanggung jawab untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada institusi yang lebih tinggi. Dalam posisi ini, kegagalan tidak dapat ditoleransi karena program pencegahan dan penanggulangan HIV sangat mempengaruhi kehidupan banyak orang khususnya dalam urusan kesehatan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah melaksanakan program dengan tepat waktu.

### **Tercapainya Tujuan**

Dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV, strategi yang digunakan adalah 95-95-95. Target tersebut ditentukan oleh *The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS* (UNAIDS) yang sebelumnya adalah 90-90-90 dengan tujuan akhir yakni *Three Zero* di tahun 2030. Di Indonesia sasaran ini juga diterapkan dan dirumuskan kembali oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sasaran tersebut tercantum dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (2) yang berisi sebagai berikut:

1. Jumlah infeksi HIV baru (insidens) menjadi 7 (tujuh) per 100.000 (seratus ribu) penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak terinfeksi.
2. 95% (sembilan puluh lima persen) ODHIV ditemukan dari estimasi;
3. 95% (sembilan puluh lima persen) ODHIV mendapatkan pengobatan ARV;
4. 95% (sembilan puluh lima persen) yang masih mendapat pengobatan ARV virusnya tidak terdeteksi; dan
5. menurunnya infeksi baru HIV pada bayi dan balita dari ibu kurang dari atau sama dengan 50 (limapuluh) per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup.

Dari kelima tujuan/target tersebut, hasilnya ditemukan bahwa empat target belum dapat tercapai. Satu target yang berhasil tercapai adalah menurunnya infeksi baru HIV pada

bayi dan balita dari ibu kurang dari atau sama dengan 50 (limapuluh) per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, pada periode tahun 2021-2022 terdapat 93.729 angka kelahiran. Sedangkan jumlah temuan kasus HIV pada bayi dan balita dalam periode yang sama adalah sebanyak 19. Meskipun angka kelahiran belum mencapai kuota, peneliti menyimpulkan bahwa capaian (e) telah terwujud.

### **Perubahan Nyata**

Indikator perubahan nyata diukur melalui seberapa besar program berhasil merubah kondisi yang sebelumnya menjadi permasalahan dalam suatu program. Tentu saja perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, apabila suatu program menghasilkan dampak positif setelah sebuah program dilaksanakan, maka program telah berjalan dengan baik dan efektif. Pada program pencegahan dan penanggulangan HIV, perubahan nyata yang diharapkan adalah perubahan yang sejalan dengan tujuan program. Untuk mengetahui perubahan tersebut peneliti telah menganalisa hasil wawancara bersama para informan guna mengetahui apakah program pencegahan dan penanggulangan HIV yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi membawa dampak kearah positif atau negatif. Berikut ini adalah hasil analisa peneliti terkait perubahan nyata pasca program diterapkan:

#### **1. Meningkatkan Kapabilitas Layanan Kesehatan**

Menurut keterangan informan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, perubahan yang nyata terjadi adalah perkembangan akses terhadap tes HIV di layanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau. Beliau juga menambahkan bahwasannya beberapa tahun lalu pelaksanaan tes VCT hanya tersedia di Puskesmas tertentu saja. Namun berkat upaya pengembangan fasilitas kesehatan yang menjadi salah satu kegiatan program pencegahan dan penanggulangan HIV, hingga saat ini sebanyak 48 Puskesmas dan 46 Rumah Sakit di Kota Bekasi telah mampu melayani tes HIV dan IMS.

#### **2. Kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan LSM HIV**

Berdasarkan keterangan informan dari Lembaga Kasih Indonesia dan Yayasan Grapiks, hubungan kerja antara Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan LSM hingga saat ini dinilai baik. Kolaborasi dua lembaga bersama Dinas Kesehatan Kota Bekasi semakin efektif dan efisien dengan memanfaatkan grup WhatsApp. Komunikasi antar stakeholder dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bekasi menjadi lebih mudah berkat adanya grup-grup WhatsApp.

#### **3. Meningkatkan Kesadaran tentang HIV**

Pada penyakit menular seperti HIV, tingkat pemahaman yang baik berdampak pada perilaku masyarakat populasi beresiko maupun yang tidak beresiko. Keterangan dari para informan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman tentang HIV. Dari sisi kelompok beresiko, para informan mengakui telah terjadi adanya perkembangan terhadap kesadaran tentang HIV di kalangan kelompok beresiko. Informan dari LSM mengkonfirmasi hal tersebut. Kepatuhan dari kelompok beresiko untuk mengikuti skrining HIV menjadi salah satu bukti peningkatan kesadaran tentang HIV.

#### **4. Stigma dan Diskriminasi Mulai Berkurang**

Berkat meningkatnya kesadaran baik dari sisi populasi beresiko maupun tenaga kesehatan di layanan, stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHIV mulai berkurang. Peneliti mengumpulkan keterangan dari informan penerima program bahwasannya tindakan diskriminasi di layanan sudah berkurang bahkan tidak ada. Dari beberapa keterangan informan, peneliti mendapatkan fakta bahwa diskriminasi yang dialami oleh kelompok beresiko dan ODHIV umumnya berasal dari masyarakat yang masih awam tentang HIV. Dinas Kesehatan Kota Bekasi melalui berbagai metode sosialisasi terus berupaya mengedukasi masyarakat tentang HIV.

5. Berkurangnya Angka Kasus HIV Baru di Tahun 2023

Diketahui bahwa pada tahun 2022, kasus baru ditemukan sebanyak 922 dari total 47.963 orang yang berhasil dites. Sedangkan pada akhir tahun 2023, jumlah orang yang berhasil menjalani tes HIV lebih banyak dari tahun 2022 yakni 66.152 orang. Meskipun jumlah tes yang dilaksanakan lebih besar, jumlah kasus HIV baru yang berhasil ditemukan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bekasi serta para *stake-holder* yang berperan dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bekasi telah berhasil menekan angka kasus baru selama tahun 2023.

### KESIMPULAN (CONCLUSION)

program pencegahan dan penanggulangan HIV yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi secara umum telah berjalan efektif. Pada indikator pemahaman program, pelaksanaan dinilai efektif karena seluruh pihak yang terlibat – baik penanggung jawab, pelaksana, maupun penerima program seperti WPS, transgender, LSL, dan ODHIV – memiliki pemahaman yang baik mengenai HIV.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan tenaga kesehatan melalui seminar serta pelatihan. Pada indikator ketepatan sasaran, program juga dinilai efektif karena penerima manfaat telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2009. Sementara itu, pada indikator ketepatan waktu, pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan, dan kegiatan tetap dapat dilaksanakan meskipun terdapat hambatan di lapangan. Namun, pada indikator tercapainya tujuan, efektivitas program belum optimal.

Dari lima target yang ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (2), hanya satu target yang berhasil dicapai, yaitu menurunnya angka infeksi baru HIV pada bayi dan balita hingga kurang dari atau sama dengan 50 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun pada indikator perubahan nyata, program dinilai efektif karena memberikan dampak positif yang signifikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya kapabilitas layanan kesehatan di Kota Bekasi, meningkatnya kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan LSM HIV, berkurangnya stigma serta diskriminasi terhadap penderita, dan menurunnya angka kasus HIV baru pada tahun 2023.

Dengan demikian, bahwa meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam pencapaian tujuan program, secara keseluruhan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bekasi telah menunjukkan hasil yang positif dan progresif.

### REFERENSI

- Jones, C. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Rajawali.
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Miles, B., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Muhadjir, N. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasorudin. (2007). HIV dan AIDS Pendekatan Biologi, Molekuler, Klinis, dan Sosial. Surabaya: Airlangga University Press.
- P Siagian, S. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2007). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Munthe, A. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat. *Jurnal Scholaria*, 5, 1-14.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2022a). Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2022. [https://siha.kemkes.go.id/portal/files\\_upload/Laporan\\_TW\\_1\\_2022.pdf](https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_1_2022.pdf)
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2022b). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual.
- Redline Indonesia. (2021). Sejarah HIV/AIDS Indonesia. <https://redlineindonesia.org/elementor-3940/>